



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE DINAS PENDIDIKAN UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf D Nomor Urut 1 huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gowa perlu melakukan Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja khususnya Belanja Gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada tanggal 06 Oktober 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Gowa Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE DINAS PENDIDIKAN UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 34

SEKREDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM

Handwritten signature and initials on a stamp grid.

: PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA DARI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE DINAS PENDIDIKAN UNTUK PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 34 TAHUN 2022  
TANGGAL : 2 Desember 2022

## BELANJA

KodeRekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>462.942.825.199</b>	<b>308.310.355.792</b>	<b>0</b>	Berdasarkan: Disposisi Bupati Gowa tanggal 1 Desember 2022 dan Surat Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 088/22/BPK.DIXI/2022 tanggal 28 November 2022 atas telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Nomor 500/2634/DISDIK/2022 tanggal, 22 November 2022 perihal Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
1.01.0.00.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
1.01.0.00.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
1.01.01.01.01.01.01	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
1.01.01.02.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>406.937.277.468</b>	<b>256.671.785.804</b>	<b>4.366.977.743</b>	
5	Belanja Pegawai	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
5	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	406.937.277.468	256.671.785.804	4.366.977.743	
5	Belanja Gaji Pokok ASN	205.723.381.713	209.214.136.426	3.490.754.713	
5	Belanja Gaji Pokok PNS	205.723.381.713	205.723.381.713	0	
	- Gaji Pokok PNS	205.723.381.713	205.723.381.713	0	
5	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3.490.754.713	3.490.754.713	
	- Gaji Pokok PPPK	0	3.490.754.713	3.490.754.713	
5	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.569.696.488	18.569.696.488	276.568.278	
5	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.569.696.488	18.569.696.488	0	
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.569.696.488	18.569.696.488	0	
5	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	276.568.278	276.568.278	
	- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	276.568.278	276.568.278	
5	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197.125.500	197.125.500	0	
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	197.125.500	197.125.500	0	
	- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	197.125.500	197.125.500	0	
5	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	

Kode Rekening				Uraian	Saldo perubahan	Saldo perubahan	Salah	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	1	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.655.194.700	17.655.194.700	385.372.900		
					Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.655.194.700	17.655.194.700	0		
					- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.655.194.700	17.655.194.700	0		
5	1	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	385.372.900	385.372.900		
					- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	385.372.900	385.372.900		
5	1	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.126.983.000	1.126.983.000	0		
5	1	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.126.983.000	1.126.983.000	0		
					- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.126.983.000	1.126.983.000	0		
5	1	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0		
					- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0		
5	1	01	06		Belanja Tunjangan Bera ASN	10.353.968.788	10.353.968.788	214.290.848		
5	1	01	06	0001	Belanja Tunjangan Bera PNS	10.353.968.788	10.353.968.788	0		
					- Belanja Tunjangan Bera PNS	10.353.968.788	10.353.968.788	0		
5	1	01	06	0002	Belanja Tunjangan Bera PPPK	0	214.290.848	214.290.848		
					- Belanja Tunjangan Bera PPPK	0	214.290.848	214.290.848		
5	1	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.534.779.276	1.534.779.276	0		
5	1	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.534.779.276	1.534.779.276	0		
					- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.534.779.276	1.534.779.276	0		
5	1	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	0	0		
					- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	0	0		
5	1	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.546.372	2.546.372	30.903		
5	1	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.546.372	2.546.372	0		
					- Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.546.372	2.546.372	0		
5	1	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	30.903	30.903		
					- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	30.903	30.903		
5	1	01	09		Belanja Tunjangan Berbasis Kinerja ASN	3.455.390.591	3.455.390.591	0		
5	1	01	09	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.455.390.591	3.455.390.591	0		
					- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.455.390.591	3.455.390.591	0		
5	1	01	09		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil lainnya ASN	548.518.191.040	548.518.191.040	0		
5	1	01	09	0001	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	548.790.441.040	548.790.441.040	0		
					- Belanja TPG PNSD	548.790.441.040	548.790.441.040	0		
					- Belanja TPG PNSD	548.790.441.040	548.790.441.040	0		
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.727.790.000	1.727.790.000	0	
					- Belanja Tamsil Guru PNSD	1.727.790.000	1.727.790.000	0		
					- Belanja Tamsil Guru PNSD	1.727.790.000	1.727.790.000	0		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah perubahan	Jumlah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4		3	4	5	6
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
5.02				KEUANGAN	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
5.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
				KABUPATEN GOWA				
5.02.1.2.02				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
5.02.0.00.0.00.05.0001				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
5.02.1.2.02.02.01				PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
	5	1		BELANJA OPERASI	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
	5	1	01	Belanja Pegawai	56.005.547.731	51.638.569.988	-4.366.977.743	
	5	1	01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	54.026.129.355	49.669.616.12	-4.366.977.743	
	5	1	01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	22.471.689.136	18.104.611.392	-4.366.977.743	
	5	1	01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.765.773.584	2.765.773.584	0	
				- Gaji Pokok PNS	2.765.773.584	2.765.773.584	0	
	5	1	01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.705.816.551	16.338.837.808	-4.366.977.743	
				- Gaji Pokok PPPK	19.705.816.551	16.338.837.808	-4.366.977.743	
	5	1	01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	303.421.986	303.421.986	0	
	5	1	01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	303.421.986	303.421.986	0	
				- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	303.421.986	303.421.986	0	
	5	1	01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	0	0	
				- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0	0	0	
	5	1	01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	195.695.500	195.695.500	0	
	5	1	01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	195.695.500	195.695.500	0	
				- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	195.695.500	195.695.500	0	
	5	1	01 01 03 0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	
				- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	
	5	1	01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	95.095.000	95.095.000	0	
	5	1	01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	95.095.000	95.095.000	0	
				- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	95.095.000	95.095.000	0	
	5	1	01 01 04 0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	
				- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	
	5	1	01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	175.017.416	175.017.416	0	
	5	1	01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	175.017.416	175.017.416	0	
				- Belanja Tunjangan Beras PNS	175.017.416	175.017.416	0	
	5	1	01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	0	0	
				- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	0	0	

Kode Rekening				Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan	
				2	3	4	5	6	
5	1	01	01	07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.886.327.816	1.886.327.816	0	
5	1	01	01	07	0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.886.327.816	1.886.327.816	0	
					- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.886.327.816	1.886.327.816	0	
5	1	01	01	07	0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	0	0	
					- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0	0	0	
5	1	01	01	08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.562	37.562	0	
5	1	01	01	08	0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.562	37.562	0	
					- Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.562	37.562	0	
5	1	01	01	08	0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	0	0	
					- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	0	0	
5	1	01	01	09	Belanja Jaminan Kesehatan ASN	24.883.297.688	24.883.297.688	0	
					0001 Belanja Jaminan Kesehatan PNS	24.883.297.688	24.883.297.688	0	
					- Belanja Jaminan Kesehatan PNS	24.883.297.688	24.883.297.688	0	
5	1	01	01	10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.011.411.813	1.011.411.813	0	
5	1	01	01	10	0001 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.011.411.813	1.011.411.813	0	
					- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.011.411.813	1.011.411.813	0	
					- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.011.411.813	1.011.411.813	0	
5	1	01	01	11	Belanja Jaminan Kesehatan ASN	3.034.235.439	3.034.235.439	0	
5	1	01	01	11	0001 Belanja Jaminan Kesehatan PNS	3.034.235.439	3.034.235.439	0	
					- Belanja Jaminan Kesehatan PNS	3.034.235.439	3.034.235.439	0	
5	1	01	01	12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.979.418.376	1.979.418.376	0	
5	1	01	01	12	0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.979.418.376	1.979.418.376	0	
					- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.979.418.376	1.979.418.376	0	
<b>Jumlah</b>					462.942.825.199	308.310.355.792	0		

BUPATI GOWA,

  
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

ASS BIDANG PEMERINTAHAN  
KABAG HUKUM

